

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

1.1 Penelitian Terdahulu

Nama & Tahun	Setyawan (2014)	Latupono & Andayani (2015)
Judul Jurnal Artikel	Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Pada Sektor Pertambangan Di Bursa Efek Indonesia)	Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan: Good Corporate Governance Variabel Moderating
Tujuan Penelitian	menganalisis pengaruh Corporate Social Responsibility dan Good Corporate Governance (komisaris independen, jumlah direksi dan jumlah komite audit) atas nilai perusahaan di emiten pertambangan di Bursa Efek Indonesia	Untuk mendapatkan bukti secara empiris terhadap pengujian pengaruh corporate social responsibility (CSR) terhadap nilai perusahaan, pengujian pengaruh good corporate governance terhadap nilai perusahaan dan pengujian pengaruh corporate social responsibility yang dimoderasi oleh good corporate governance terhadap nilai perusahaan
Variabel	Corporate Social Responsibility and Good Corporate Governance (komisi Independen, ukuran direksi and ukuran komite audit) serta nilai perusahaan	Corporate Social Responsibility and Good Corporate Governance (kepemilikan manajerial) dan nilai perusahaan
Pengukuran Variabel/ Indikator	<ul style="list-style-type: none"> - Nilai perusahaan di hitung menggunakan tobin's q (PBV) - CSR menggunakan variabel dummy - GCG (komisaris dewan direksi , ukuran dewan direksi dan komite audit) 	<ul style="list-style-type: none"> - Nilai perusahaan ($Q = (MVE + DEBT) / TA$) - CSR menggunakan variabel dummy (GRI) - GCG dengan menggunakan presentasi kepemilikan manajerial

“PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN *CORPORATE SOSIAL RESPONSIBILITY* TERHADAP NILAI PERUSAHAAN (STUDI KASUS PADA SEKTOR PERTAMBANGAN SUB SEKTOR BATU BARA TAHUN 2014-2016)”

TRI APRILIA AYUNINGTIAS NPK: A.2012.1.31956

Hasil Penelitian	Corporate Social Responsibility tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Sedangkan pada variabel GCG (audit independen dan komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan hanya satu variabel yang berpengaruh yaitu ukuran dewan direksi).	corporate social responsibility berpengaruh terhadap nilai perusahaan dan good corporate governance yang diproksikan dengan kepemilikan manajerial mampu mempengaruhi hubungan antara corporate social responsibility dengan nilai perusahaan
------------------	---	---

Nama & Tahun	Raharja (2014)	Dianawati & Fuadati (2016)
Judul Jurnal Artikel	Analisis Pengaruh Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan	Pengaruh Csr Dan Gcg Terhadap Nilai Perusahaan: Profitabilitas Sebagai Variabel Intervening
Tujuan Penelitian	Analisis Pengaruh penerapan mekanisme GCG terhadap Nilai Perusahaan	untuk menelaah dan menguji lebih lanjut mengenai pengaruh CSR dan GCG terhadap nilai perusahaan.
Variabel	Kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komite audit, komisaris independen, audit eksternal, dan nilai perusahaan	Profitabilitas (ROE), Good Corporate Governance (CGPI), Corporate Social Responsibility (CSR).
Pengukuran Variabel/ Indikator	<ul style="list-style-type: none"> - Kepemilikan Manajerial = dihitung dengan jumlah saham yang dimiliki manajemen terhadap jumlah saham yang beredar. - Kepemilikan Institusional = dihitung dengan jumlah saham yang dimiliki institusi terhadap jumlah saham yang beredar. - Komite Audit = Jumlah komite audit yang ada di dalam perusahaan - Komisaris Independen = dihitung dengan jumlah komisaris independen terhadap jumlah anggota dewan komisaris. - Eksternal Auditor = merupakan 	-

	<p>variabel dummy, bagi perusahaan perbankan yang menggunakan eksternal auditor (BIG 4) diantaranya Pricewater House Coopers, Deloitte Touche Tohmatsu, Ernst & Young, dan KPMG maka akan mendapat nilai 1. Jika tidak menggunakan eksternal auditor (BIG 4) maka akan mendapatkan nilai 0.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nilai Persahaan (PBV) - Ukuran perusahaan (besar kecil nya perusahaan) 	
Hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. 2. Kepemilikan Institusional berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. 3. Komite Audit berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. 4. Proporsi komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. 5. Eksternal auditor berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. 6. Variabel kontrol ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusaha 	Semua variabel independen menimbulkan dampak yang signifikan terhadap nilai perusahaan melalui profitabilitas (ROE) sehingga layak untuk digunakan dalam penelitian. Hasil uji secara langsung maupun tidak langsung menunjukkan variabel corporate social responsibility (CSR), good corporate governance (GCG) dan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan

Nama & Tahun	Prastuti & Budiasih (2015)	Denies & Priantinah M.Si., Ak.
Judul Jurnal Artikel	Pengaruh Good Corporate Governance Pada Nilai Perusahaan Dengan Moderasi Corporate Social Responsibility	Pengaruh Good Corporate Governance Dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2007-2010

Tujuan Penelitian	untuk mengetahui pengaruh Good Corporate Governance yang diproksikan dengan kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris, dan komite audit pada nilai perusahaan, serta apakah Corporate Social Responsibility dapat memoderasi pengaruh Good Corporate Governance pada nilai perusahaan.	Pengaruh GCG Terhadap Nilai Perusahaan dengan variabel kontrol Size dan Leverage, Pengaruh Pengungkapan CSR Terhadap Nilai Perusahaan dengan variabel kontrol Size, Jenis industri, Profitabilitas, dan Leverage, Pengaruh GCG Dan Pengungkapan CSR Terhadap Nilai Perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2007-2010.
Variabel	GCG, nilai perusahaan, corporate social responsibility	Good Corporate Governance, Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Nilai perusahaan
Pengukuran Variabel/ Indikator	-	Nilai Perusahaan = tobin's Q CSR = Variabel dummy Ukuran perusahaan = log TA Profitabilitas = ROA, DER Jenis Perusahaan
Hasil Penelitian	variabel kepemilikan institusional dan komite audit berpengaruh negatif pada nilai perusahaan. Sedangkan variabel kepemilikan manajerial dan proporsi dewan komisaris tidak berpengaruh pada nilai perusahaan. Pengungkapan corporate social responsibility tidak mampu memoderasi pengaruh good corporate governance pada nilai perusahaan	<ol style="list-style-type: none"> 1) GCG berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan dengan variabel kontrol Size dan Leverage pada perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2007-2010 2) Pengungkapan CSR berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Nilai Perusahaan dengan variabel kontrol Size, Jenis industri, Profitabilitas, dan Leverage pada perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2007-2010 3) GCG dan Pengungkapan CSR berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2007-2010.

--	--	--

Nama & Tahun	Purbopangestu & Subowo(2014)	Randy dan Juniarti(2013)
Judul Jurnal Artikel	Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Corporate Social Responsibility Sebagai Variabel Intervening	Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan Yang Terdaftar Di Bei 2007-2011
Tujuan Penelitian	untuk menguji pengaruh good corporate governance (GCG) terhadap nilai perusahaan dengan corporate social responsibility (CSR) sebagai variabel intervening. Sampel dalam penelitian ini adalah 16 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI	untuk menguji pengaruh penerapan Good Corporate Governance terhadap Nilai Perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2007-2011.
Variabel	Kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan komite audit/komisaris independen, dan CSR	Good Corporate Governance, Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Nilai perusahaan
Pengukuran Variabel/ Indikator	<p>Nilai Perusahaan = pbv</p> <p>Kepemilikan manajerial = saham yang dimiliki manajer : total saham beredar x 100%</p> <p>Kepemilikan institusional = saham yang dimiliki institusi : total saham beredar x 100%</p> <p>Komite Audit= Menjumlahkan rapat yang dilakukan komite audit</p> <p>Komisaris independen = jumlah komisaris independen : jumlah dewan komisaris x 100%</p>	<p>Nilai perusahaan = tobins' q</p> <p>Market share = presentase penjualan Sektor Industri = pembagian yang sesuai klarifikasi</p> <p>Size = log TA</p>

Hasil Penelitian	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komisaris independen dan pengungkapan CSR berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, sedangkan faktor lainnya tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Kepemilikan manajerial dan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap pengungkapan CSR sedangkan kepemilikan institusional dan komite audit tidak berpengaruh. CSR bukan merupakan variabel intervening dalam pengaruh GCG terhadap nilai perusahaan.	Hasil penelitian membuktikan bahwa market share tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Ukuran perusahaan mempunyai pengaruh negatif tapi tidak signifikan terhadap Nilai Perusahaan. Sektor Industri berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan. Sedangkan GCG mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan.
------------------	--	--

Adapun penjelasan dari penelitian diatas adalah terdapat bebrapa persamaan dari beberapa peneliti yaitu Budi S (2016), Siti & Andayani (2015), Ramadhan & Raharja (2014), Cici & Rokhmi (2016), Ketut & Gusti (2015), Reny & Priantinah (200) mengungkapkan bahwa terdapat variabel yang mempengaruhi nilai perusahaan yaitu diantaranya terdapat pada *Good corporate Governance* dan *Coustamer Sosial Responsibility*. Dimana yang menjadikan perbedaan satu sama lain adalah penggunaan variabel *Good Corporate Governance* yang diaplikasikan di beberapa variabel (Kepemilikan menejerial, kepemilikan institusional, komite audit, proporsi dewan komisaris, dan audit eksternal).

Di dalam penelitian Budi (2014), peneliti hanya menggunakan tiga variabel GCG yang digunakan untuk mempengaruhi variabel independen nilai perusahaan yaitu terdapat variabel (komite audit, dewan komisaris, dan audit eksternal) dalam mempengaruhi nilai perusahaan. Dari penelitian ini menghasilkan Corporate Social Responsibility tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Sedangkan pada variabel GCG (audit independen dan komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan hanya satu variabel yang berpengaruh yaitu ukuran dewan direksi). Sedangkan pada penelitian Siti & Andayani (2015) dalam penelitian pengaruh corporate social responsibility terhadap nilai perusahaan dimana *good corporate*

governance variabel moderating dan hasil dari penelitian tersebut adalah *corporate social responsibility* berpengaruh terhadap nilai perusahaan dan *good corporate governance* yang diproksikan dengan kepemilikan manajerial mampu mempengaruhi hubungan antara *corporate social responsibility* dengan nilai perusahaan.

Cici & Rokhmi (2016) pada penelitian Pengaruh *Csr* Dan *Gcg* Terhadap Nilai Perusahaan: Profitabilitas Sebagai Variabel Intervening. Menghasilkan bahwa Semua variabel independen menimbulkan dampak yang signifikan terhadap nilai perusahaan melalui profitabilitas (ROE) sehingga layak untuk digunakan dalam penelitian. Hasil uji secara langsung maupun tidak langsung menunjukkan variabel *corporate social responsibility* (CSR), *good corporate governance* (GCG) dan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.

Ramadhan & Raharja (2014) pada penelitian Analisis Pengaruh Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan. Menghasilkan Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan, kepemilikan Institusional berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan, komite Audit berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. 4. Proporsi komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan, Eksternal auditor berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan, variabel kontrol ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Hasil ini sama dengan penelitian Ketut & Gusti (2015) yang menghasilkan variabel kepemilikan institusional dan komite audit berpengaruh negatif pada nilai perusahaan. Sedangkan variabel kepemilikan manajerial dan proporsi dewan komisaris tidak berpengaruh pada nilai perusahaan. Pengungkapan *corporate social responsibility* tidak mampu memoderasi pengaruh *good corporate governance* pada nilai perusahaan.

1.2 Teori Keagenan (Agency Theory)

Hubungan keagenan sebagai sebuah kontrak dimana satu atau lebih principle menyewa orang lain (agen) untuk melakukan beberapa jasa untuk kepentingan mereka dengan mendelegasikan beberapa wewenang untuk memmbuat keputusan kepada agen. Pemisahan kepemilikan dan pengendalian menyebabkan manajemen bertindak tidak sesuai dengan keinginan principal. Dalam melaksanakan tugas manerial, manajemen memiliki tujuan pribadi yang bersaing dengan tujuan principal dalam memaksimalkan kemakmuran pemegang saham. Pemisahan kepemilikan dan pengendalian perusahaan disebut konflik keagenan (*agency conflict*). (Josem dan meckling 1976 dalam Mardiyah, 2006, hal 227) Dalam hal ini, Prinsipal mendelegasikan wewenang kepada agen dalam mengambil keputusan. Yang mana antar keduanya saling mementingkan kepentingan pribadi, mereka kesulitan membedakan penghargaan atas preferensi, kepercayaan dan informasi. Hak dan kewajiban dari prinsipal dan agen dijelaskan dalam sebuah perjanjian kerja yang saling menguntungkan. Agency teori sangat melekat dengan hubungan kontrak kerja dan sistem informasi yang akan memaksimalkan fungsi manfaat prinsipal, dan kendala-kendala perilaku yang muncul dari kepentingan agen. Raharjo (2007) mengungkapkan bahwa pihak agensi memiliki informasi keuangan daripada pihak *principal* (keunggulan informasi), sedangkan dari pihak *principal* boleh jadi memanfaatkan kepentingan pribadi atau golongannya sendiri (*self-interest*) karena memiliki keunggulan kekuasaan (*discretionary power*).

Bastian (2006:213) Teori agensi (*agency theory*) atau disebut *contracting theory*, assumsi individu bertindak demi kepentingannya sendiri. Assumsi lain menyebutkan bahwa entitas merupakan titik pertemuan bagi berbagai jenis hubungan bersifat kontrak antara manajemen, pemilik, kreditur dan Pemerintah. Hubungan ini banyak di atur berdasarkan angka-angka akuntansi. Hubungan keagenan mencakup

perjanjian, pinjaman, kompensasi manajern, kontrak-kontrak dan ukuran perusahaan.

Dalam hal ini, agency konflik salah satunya terjadi ketika ada pemegang saham yang dominan akan menginginkan keuntungan sesuai kebutuhan principal yang lainnya. Oleh karena, perusahaan akan berusaha baik dimata masyarakat. Hal ini mendorong manajer (agen) untuk melakukan pemberian informasi, salah satunya pengungkapan laporan keuangan lingkungan untuk meningkatkan investasi.

2.3 Nilai Perusahaan

Nilai perusahaan merupakan pandangan dari beberapa pihak terhadap kualitas suatu perusahaan itu dalam menghasilkan keuntungan. Nilai perusahaan dapat diketahui pada kondisi tertentu dimana masyarakat dapat melihat gambaran suatu perusahaan dengan kepercayaan yang lebih baik. Kondisi untuk mendapatkan nilai perusahaan tidak dengan waktu yang singkat, dibutuhkan beberapa tahun untuk meningkatkan nilai perusahaan. Secara normative, bahwa tujuan dari keputusan keuangan dapat meningkatkan nilai perusahaan. Hal itu akan menunjukkan bahwa peningkatan terjadi pada kemakmuran stakeholder, yaitu pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan seperti karyawan, manajemen, kreditur, pemasok, masyarakat sekitar dan pemerintah.

Menurut Nurlala dan Ishlahuddin (2008), nilai perusahaan didefinisikan sebagai nilai pasar. Nilai perusahaan dapat memberikan kemakmuran atau keuntungan bagi pemegang saham secara maksimum. Sehingga, ketika harga saham mengalami kenaikan maka keuntungan bagi pemegang saham akan semakin tinggi pula. Sehingga banyak investor yang meminati dan menyebabkan nilai perusahaan akan meningkat. Hal tersebut dapat dicapai secara maksimum jika para pemegang saham menyerahkan urusan pengelolaan perusahaan kepada orang-orang yang berkompeten dalam bidangnya, seperti manajer maupun komisaris. Dalam kata lain, Nilai perusahaan dapat menggambarkan seberapa baik atau buruk manajemen

mengelola kekayaannya, hal ini bisa dilihat dari pengukuran kinerja keuangan yang diperoleh.

Nilai perusahaan yang tinggi akan diikuti oleh tingginya kemakmuran pemegang saham (Brigham Gapensi, 1996). Semakin tinggi harga saham maka akan semakin meningkat nilai perusahaan. Pada umumnya, kenaikan nilai perusahaan bisa diperoleh ketika pengambilan keputusan manajemen tentang keuangannya. Semakin tinggi nilai perusahaan semakin tinggi kemakmuran yang akan diterima oleh pemegang saham (pemilik perusahaan). Bagi perusahaan yang menerbitkan saham dipasar modal harga saham yang diperjual belikan dibursa merupakan indikator nilai perusahaan. Kekayaan pemegang saham dan perusahaan dipresentasikan oleh harga pasar dari saham yang merupakan cerminan dari keputusan investasi, pendanaan (*financing*), dan manajemen aset.

Perusahaan akan mengungkapkan suatu informasi jika informasi tersebut dapat meningkatkan nilai perusahaan. Perusahaan dapat menggunakan informasi tanggung jawab sosial sebagai keunggulan kompetitif perusahaan. Perusahaan yang memiliki kinerja lingkungan dan sosial yang baik akan direspon positif oleh investor melalui peningkatan harga saham. Apabila perusahaan memiliki kinerja lingkungan dan sosial yang buruk maka akan muncul keraguan dari investor sehingga direspon negatif melalui penurunan harga (Rustriarini, 2010).

Latupono & Andayani (2015) mengungkapkan bahwa jika menginginkan pencapaian nilai perusahaan dapat dicapai dengan maksimum, jika para pemegang saham menyerahkan urusan pengelolaan perusahaan kepada orang-orang yang berkompoten dalam bidangnya, seperti manajer maupun komisaris.

Menurut Brigham dan Houston (2010) terdapat beberapa pendekatan analisis rasion dalam penilaian nilai pasar, yaitu :



1. *Price Earning Ratio (PER)*

Price earning ratio adalah rasio harga per saham terhadap laba per saham menunjukkan jumlah yang rela dibayarkan oleh investor untuk setiap dolar labar yang dilaporkan.

2. *Price book value ratio (PBVR)*

PBVR mengukur nilai yang diberikan pasar keuangan kepada kepala manajemen dan organisasi perusahaan sebagai sebuah perusahaan yang tumbuh. Perusahaan yang dipandaang baik oleh investor yanitu perusahaan dengan laba dan arus kas yang aman, hal itu dapat dicerminkan melalui price to book value

3. *Market book ratio (MBR)*

Market book ratio adalah perbandingan antara harga pasar per lembar saham terhadap nilai buku ekuitas per lembar saham

4. *Devidend Yield Ratio*

Devidend Yield ditampilkan dalam bentuk presentase yang dihitung dengan jumlah deviden yang dibayarkan pada setiap lembar saham dalam setahun penuh yang kemudian dibagi dengan harga saham saat ini.

5. *Deviden Payout Ratio*

Deviden Payout Ratio adalah presentase dari laba bersih yang akan dibayarkan sebagai sebagai deviden tunai kepada pemegang saham. *Deviden Payout Ratio* merupakan perbandingan antara *deviden per share* dengan *earning per share*

2.8 Good Corporate Governance (GCG)

Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) (2001) mendefinisikan *Good corporate Governance* sebagai sekumpulan peraturan untuk mengatur dan mengendalikan pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah karyawan serta pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang

berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka. Dengan pengertian lain, GCG merupakan seperangkat peraturan dalam rangka pengendalian perusahaan untuk menghasilkan value added bagi para stakeholders karena dengan adanya GCG akan terbentuk pola kerja manajemen yang transparan, bersih, dan profesional (Effendi, 2008:2). Menurut *Cooper et al.*, mengungkapkan bahwa *Good Corporate Governance* terkait dalam pengambilan keputusan yang efektif. Keberadaan GCG ini dibangun melalui kultur organisasi, nilai-nilai, sistem, berbagai proses, kebijakan-kebijakan dan struktur organisasi dengan memiliki tujuan untuk mencapai bisnis yang menguntungkan, efisiensi dan efektif dalam mengelola resiko serta bertanggung jawab dalam hal ini kepentingan *stakeholder*.

Tujuan *Good corporate governance* adalah menciptakan nilai tambah bagi stakeholders. *Good Corporate governance* yang efektif diharapkan dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Manfaat dari penerapan *good corporate governance* dapat diketahui dari harga saham perusahaan yang bersedia dibayar oleh investor. Adapun prinsip-prinsip GCG yang disusun Komite Nasional Kebijakan Governance (2006), yaitu:

1. Transparansi (Transparency),
2. Akuntabilitas (Accountability),
3. Responsibilitas (Responsibility),
4. Independensi (Independency),
5. Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness).

Ketika Perusahaan mampu melaksanakan segala aktivitas bisnis dengan menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* dengan baik maka perusahaan akan mampu memiliki tingkat sensitivitas yang tinggi sehingga diharapkan dapat membantu terwujudnya persaingan usaha yang sehat dan tentunya bebas praktik monopoli. Prinsip-prinsip yang telah disebutkan di atas sebaiknya diimbangi dengan *good faith* (bertindak atas itikad baik) dan kode etik perusahaan serta pedoman *good corporate governance*, agar visi dan misi perusahaan yang

berwawasan internasional dapat terwujud. Sehingga, Hal ini dapat dijadikan sebagai ukuran perusahaan untuk menghasilkan suatu kinerja perusahaan yang lebih baik.

Rachmawati & Triatmoko (2007) dalam Perdana & Raharja (2014) mengemukakan ada 4 bagian dalam mekanisme *corporate governance* yang sering dipakai dalam berbagai penelitian untuk mengurangi konflik keagenan, yaitu komite audit, komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial. Dalam penelitian ini menggunakan kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komite audit, proporsi komisaris independen dan auditor eksternal dalam memenuhi mekanisme *Good Corporate Governance (GCG)*.

a) **Kepemilikan Menejerial**

Kepemilikan manajerial adalah jumlah pemegang saham yang berpartisipasi pada manajemen untuk pengambilan keputusan oleh direktur dan komisaris (Diyah dan Widanar, 2009 dalam Apriada 2010). Christiawan dan Tarigan (2007) menggambarkan kepemilikan menejerial bahwa menejer bisa memiliki peran sebagai sekaligus pemegang saham. Kepemilikan menejerial merupakan informasi yang penting bagi pengguna laporan keuangan, sehingga kepemilikan menejerial harus di ungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Kepemilikan menejerial memiliki fungsi dalam menyelaraskan kepentingan-kepentingan manajer dengan kepentingan-kepentingan pemegang saham eksternal (Listiani,2003). Dalam menjalankan aktivitas perusahaan, perusahaan yang memiliki kepemilikan menerial dan tidak memiliki kepemilikan akan berbeda hasilnya. Karena manejer dengan kepemilikan menejerial, menejer sekaligus pemegang saham tentunya dapat menyelaraskan kepentingannya dengan kepentingan saham (Fitra, 2017). Sehingga ketika terjadi keselarasan kepentingan diharapkan dapat memperkecil konflik keagenan dengan memiliki tujuan yang sama dalam peningkatan nilai perusahaan. Naik turunnya nilai perusahaan dipengaruhi oleh struktur



kepemilikannya. Karena dua aspek yang menjadi pertimbangan adalah (Fitria, 2017) :

1. Konsentrasi kepemilikan perusahaan oleh pihak luar
2. Kepemilikan perusahaan oleh manajemen

Dalam perusahaan manajer yang memiliki saham di dalam perusahaan dengan pihak luar akan memiliki perbedaan dalam campur tangan untuk tujuan perusahaan, bagi manajer dapat langsung berhubungan dengan kegiatan perusahaan, berbanding terbalik dengan pemilik dari pihak luar, yang sulit ikut campur tangan kegiatan.

Kepemilikan manajerial yang akan meningkat, bisa meningkatkan nilai perusahaan (Apriada, 2010). Kepemilikan pemegang saham sangatlah ditentukan seberapa besar kepemilikan saham di suatu perusahaan. kepemilikan manajerial merupakan bentuk kepemilikan pemegang saham dalam suatu perusahaan, kepemilikan manajerial bisa menentukan pemegang saham aktif dalam manajemen, sehingga bisa menaikkan kepercayaan principle kepada agen, hal tersebut bisa menaikkan nilai perusahaan di mata investor.

Menurut Downes dan Goodman 1999 dalam Oktavianti dan Rizki (2014) mengungkapkan bahwa kepemilikan manajerial adalah para pemegang saham yang juga berarti dalam hal ini sebagai pemilik dalam perusahaan dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan pada suatu perusahaan yang bersangkutan.

b) Kepemilikan Institusional

Konflik dapat diminimalisasi dengan adanya peran yang sangat penting dari kepemilikan institusional (Jensen dan Meckling, 1976). Dalam mentoring untuk pengambilan keputusan yang efektif dapat diselesaikan dengan adanya kepemilikan institusional. Hal tersebut dikarenakan kepemilikan institusional ikut berperan dalam pengambilan keputusan yang strategis

sehingga tidak dapat mudah percaya dalam tindakan memanipulasi data. *Monitoring* tersebut akan menjamin kemaksmuran pemegang saham, dalam hal ini pengaruh kepemilikan institusional dalam perusahaan sebagai agen pengawas dapat ditekan melalui investasi yang cukup besar dalam pasar modal (Tarjo,2008).

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan sejumlah saham perusahaan oleh lembaga keuangan non bank dimana lembaga tersebut mengelolah dana atas nama orang lain (www.sahamoke.com). Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam mengawasi manajemen karena dengan adanya kepemilikan oleh institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Kepemilikan institusional sebagai agen pengawas ditekan melalui investasi mereka yang cukup besar dalam pasar modal. Dengan kepemilikan institusional yang tinggi maka akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku *opportunistic manajer*.

Terdapat nama-nama lembaga yang termasuk kepemilikan intitusional yaitu perusahaan reksa dana, dana pensiun, asuransi, investasi, yayasan swasta, wakaf, atau badan besar lainnya yang mengelolah atas dana orang lain. Menurut penelitian Harum (2008) dalam Ariyanto & Setyorini (2013) mengungkapkan bahwa para pemegang saham yang besar seperti kepemilikan institusional akan dapat memonitor tim menejem secara lebih efektif. Kinerja manajer akan meningkat ketika institusi melakukan pengawasan (Anastasia & Rustiana,2012)



c) Proporsi Komisari Independen

Penjelasan pasal 120 ayat (2) undang-undang Nomer 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas (UUPT) menjelaskan bahwa dewan komisaris

“komisaris independen yang ada didalam pedoman tata kelola perseroan yang baik (code of good corporate governance) adalah komisaris dari pihak luar”.

Komisaris independen diangkat berdasarkan keputusan Rapat umum pemegang saham (“RUPS”) dari pihak yang terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota Direksi dan/atau anggota dewan komisaris lainnya (www.hukumonline.com). Susiana dan Herawati (2007) dalam Anastasya & Rustiana (2012) mengungkapkan bahwa komisaris independen memiliki tujuan untuk menyeimbangkan pengambilan keputusan dalam perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dan pihak-pihak lain yang terkait.

Dewan komisaris adalah anggota komisaris yang tidak terafiliasi dengan menejer, anggota dewan komisaris lainnya, dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis dan hubungan lainnya yang dapat memperbarui kemampuannya untuk bertindak independen atau semata-mata demi kepentingan perusahaan (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006). Dewan komisaris memegang peranan penting dalam pelaksanaan GCG. Secara teori dan praktik, tugas utama dari dewan komisaris adalah melakukan fungsi pengawasan terhadap manajemen untuk memastikan bahwa mereka melakukan segala aktivitas dengan kemampuan terbaiknya bagi kepentingan peseroan, serta meninggalkan keputusan yang tidak menguntungkan. Hal ini sejalan dengan esensi *corporate governance*, yaitu meningkatkan nilai perusahaan melalui supervise atau monitoring kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap shareholders dan stakeholders lain (Suhartanti dan Asyik, 2016). Dewan Komisaris merupakan

inti dari corporate governance yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Tugas-tugas dewan komisaris menurut OECD dalam FCGI (2000:5) adalah :

1. Menilai dan mengarahkan strategi perusahaan, garis-garis besar rencana kerja, kebijakan pengendalian resiko, anggaran tahunan dan rencana usaha, menetapkan sasaran kerja, mengawasi pelaksanaan dan kinerja perusahaan serta memonitor penggunaan modal perusahaan serta memonitor penggunaan modal perusahaan, investasi dan penjualan.
2. Menilai sistem pendapatan pengajian pejabat pada posisi kunci dan pengajian anggota dewan direksi, serta menjamin suatu proses pencalonan anggota dewan direksi yang transparan dan adil.
3. Memonitor dan mengatasi masalah benturan kepentingan pada tingkat manajemen, anggota dewan direksi dan anggota dewan komisaris termasuk penyalahgunaan aset perusahaan dan manipulasi transaksi perusahaan
4. Memonitor pelaksanaan *governance* dan mengadakan perubahan dimana perlu
5. Memantau proses keterbukaan dan efektifitas komunikasi dalam perusahaan.

d) Komite Audit

Penjelasan pasal 121 ayat (1) undang-undang Nomer 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas (UUPT) menjelaskan bahwa komite audit merupakan salah satu jenis komite yang terbentuk oleh dewan komisaris (www.hukumonline.com). Yahya (200:479) menjelaskan bahwa yang membentuk komite audit adalah dewan komisaris. Komite audit merupakan

sekelompok orang yang dipilih dari dewan komisaris perusahaan yang bertanggung jawab untuk membantu auditor dalam mempertahankan independensinya dari manajemen (Ramadhan & Raharja, 2014). PT. Bursa Efek Jakarta No. Kep-315/BEJ/06-2000 poin 2f dalam Ramadhan & Raharja (2014) mengungkapkan bahwa

“Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris Perusahaan Tercatat yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris Perusahaan Tercatat untuk membantu dewan komisaris Perusahaan Tercatat melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam pengelolaan Perusahaan Tercatat.”

Komite audit merupakan pihak independen dalam hal keanggotaan dan fungsi audit. Karena dibutuhkan transparansi audit dalam pertanggungjawaban manajemen perusahaan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan para pelaku pasar modal. Kep.29/PM/2004 menyatakan komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melaksanakan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan. Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) mendefinisikan komite audit sebagai berikut yaitu suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibantu oleh dewan komisaris dan dengan demikian tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris (atau dewan pengawas) dalam menjalankan fungsi pengawasan (oversight) atas proses pelaporan keuangan, manajemen resiko, pelaksanaan audit dan implementasi dari corporate governance di perusahaan-perusahaan. Komite audit memiliki tugas memastikan penerapan prinsip-prinsip akuntansi dalam menghasilkan informasi keuangan yang akurat dan berkualitas (Wardhani,2008).

Menurut kep-339/BEI/07-2001 bahwa kenaggotaan komite audit sekurang-kurangnya terdiri tiga orang, satu diantaranya merupakan komisaris independen perusahaan yang sekaligus mernagkap sebagai anggota, sedangkan anggota lain merupakan pihak ekstern yang indepen perusahaan yang sekaligus merangkap sebagi anggota, sedangkan anggota lain merupakan pihak ekstern yang independen dimana sekurang-kurangnya satu diantaranya memiliki kemampuan di bidang akuntansi dan/atau keuangan.

e) Audit Eksternal

Audit eksternal merupakan pemeriksaan laporan keuangan perusahaan yang dipersiapkan oleh suatu organisasi tertentu yang dilakukan oleh pihak eksternal. Tujuan dari Audit eksternal adalah untuk memastikan laporan keuangan sesuai dengan kondisi sebenarnya tanpa adanya tindak kecurangan di dalamnya. Kegiatan Audit Eksternal dimaksudkan sebagai persyaratan pada perusahaan yang go public untuk memberikan bukti akan kebenaran laporan keuangan kepada investor. Selain itu juga bisa dimaksudkan untuk melakukan tugas khusus seperti penyelidikan (www.Wikipedia.com). Auditor hanya memiliki waktu yang sangat terbatas dalam melakukan pekerjaannya, oleh karena itu mereka hanya berkonsentrasi pada pengujian validitas dari beberapa sampel dari pada mengecek semuanya. Walaupun auditor adalah independen dalam mengerjakan pekerjaannya, mereka tetap menerima gaji dari kliennya.

Kantor akuntan publik adalah organisasi yang diciptakan untuk memberikan jasa akuntansi profesional, termasuk audit. Biasanya didirikan sebagai kepemilikan pribadi atau persekutuan.

Menurut Mulyadi (2002:19) terdapat lima pendapat yang mungkin diberikan oleh akuntan publik atas laporan keuangan yang diauditnya. Pendapat tersebut adalah:

1. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion)

Pendapat wajar tanpa pengecualian diberikan oleh auditor jika tidak terjadi pembatasan dalam lingkup audit dan tidak terdapat pengecualian yang signifikan mengenai kewajaran ran penerapan prinsip akuntansi yang berterima umum dalam penyusunan laporan keuangan, konsistensi penerapan prinsip akuntansi berterima umum tersebut, serta pengungkapan memadai dalam laporan keuangan. Laporan audit yang berisi pendapat wajar tanpa pengecualian adalah laporan keuangan yang paling dibutuhkan oleh semua pihak, baik oleh klien, pemakai informasi keuangan, maupun oleh auditor. Kata wajar dalam paragraph pendapat mempunyai makna:

- a. Bebas dari keragu-raguan dan ketidakjujuran.
 - b. Lengkap informasinya.
2. Laporan yang Berisi Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan Bahasa Penjelasan (Unqualified Opinion Report with Explanatory Language).

Jika terdapat hal-hal yang memerlukan bahasa penjelasan, namun laporan keuangan tetap menyajikan secara wajar posisi keuangan dan hasil usaha pada perusahaan klien, auditor dapat menerbitkan laporan audit bentuk baku.

3. Pendapat Wajar dengan Pengecualian (Qualified Opinion)

Auditor memberikan pendapat wajar dengan pengecualian dalam laporan audit, jika auditor menjumpai kondisi-kondisi berikut ini:

- a. Lingkup audit dibatasi oleh klien.
- b. Auditor tidak dapat melaksanakan prosedur audit penting atau tidak dapat memperoleh informasi penting karena kondisi-kondisi yang berada diluar kekuasaan klien maupun auditor.
- c. Laporan keuangan tidak disusun sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum.

d. Prinsip akuntansi berterima umum yang digunakan dalam laporan keuangan tidak diterapkan secara konsisten

4. Pendapat tidak Wajar (Adverse Opinion)

Auditor memberikan pendapat tidak wajar jika laporan keuangan klien tidak disusun berdasarkan prinsip akuntansi berterima umum sehingga tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas perusahaan klien. Auditor juga akan memberikan pendapat tidak wajar jika ia tidak dibatasi lingkup auditnya, sehingga ia dapat mengumpulkan bukti kompeten yang cukup untuk mendukung pendapatnya. Jika laporan keuangan diberi pendapat tidak wajar oleh auditor, maka informasi yang terdapat dalam laporan keuangan sama sekali tidak dapat dipercaya dan tidak dapat digunakan oleh pemakai informasi keuangan untuk pengambilan keputusan

Selain itu, auditor pada umumnya memberikan surat yang berisi kelemahan internal manajemen, diharapkan dari surat tersebut perusahaan bisa merespon dengan baik sehingga kinerja perusahaan semakin baik. Kantor akuntan publik biasanya didirikan oleh perseorangan atau pribadi yang memberikan jasa profesional. Menurut Balsam dalam Wahid (2013) menyatakan bahwa kualitas audit yang tinggi (dalam hal ini KAP BIG N) dapat mendeteksi manajemen laba karena pengetahuan superior mereka dan menekan manajemen laba oportunitis untuk menjaga reputasi mereka. Auditor yang memiliki kualitas tinggi memberikan kepastian yang besar terhadap kesesuaian laporan keuangan dengan prinsip berterima umum (Mayangsari dalam Wahid, 2013). Jika risiko klien dianggap konstan, manajemen ketika membuat ramalan laba tersebut bersikap jujur dan kualitas auditor tidak berpengaruh terhadap ramalan itu sendiri

2.9 Corporate Sosial Responsibility

Perusahaan sekarang ini semakin menyadari *Corporate Sosial Responsibility* bukan hanya sebagai bentuk kepedulian terhadap *stakeholder* tetapi lebih dari tuntutan agar perusahaan dapat bertahan dan berkembang (Nurdizal *et al.*, 2012:9). Sehingga dalam hal ini hubungan CSR dengan *stakeholder* merupakan bentuk hubungan yang menentukan keberhasilan dalam jangka panjang. Dalam ensiklopedia bebas, Wikipedia, definisi *Corporate Sosial Responsibility* (selanjutnya disebut CSR) merupakan bentuk tanggung terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan. Konsep tersebut bukan hanya berlaku pada suatu perusahaan, tetapi juga bentuk organisasi. *World Business Council on Sustainable Development (WBCSD)* tanggung jawab sosial yaitu suatu komitmen bisnis yang berkelanjutan untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi, melalui kerja sama dengan para karyawan serta perwakilan mereka, keluarga dari mereka, komunitas setempat maupun masyarakat umum untuk meningkatkan kualitas kehidupan dengan cara yang bermanfaat baik bagi bisnis sendiri maupun untuk pembangunan.

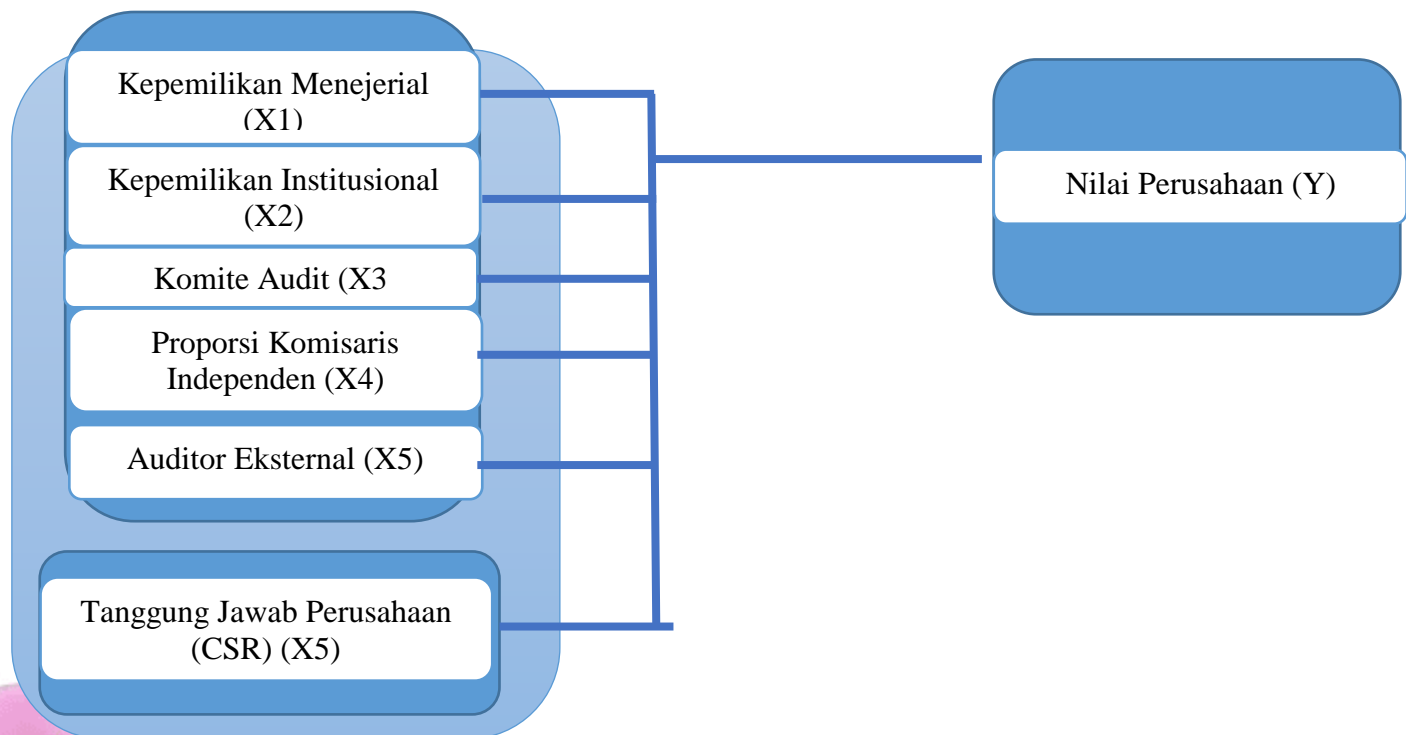
Berdasarkan konsep ISO 2600, penerapan tanggung jawab sosial perusahaan hendaknya terintegrasi pada seluruh aktivitas organisasi yang mencakup isu-isu pokok berikut ini:

1. Pengembangan masyarakat;
2. Konsumen;
3. Praktik kegiatan institusi yang sehat;
4. Lingkungan;
5. Ketenagakerjaan;
6. Hak Asasi Manusia;
7. Organizational Governance.

Pengungkapan tanggung jawab sosial adalah proses pengkomunikasikan efek-efek sosial dan lingkungan atas tindakan-tindakan ekonomi perusahaan pada kelompok-

kelompok tertentu dalam masyarakat dan pada masyarakat secara keseluruhan (Waryanti, 2009 dalam Hesty dan Widiana, 2015). Perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya harus melakukan tindakan-tindakan untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat, yang mengartikan bahwa suatu organisasi bukan hanya fokus pada keuntungan dalam satu sisi, tetapi bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar. Menurut Global Reporting Initiative (GRI) (2006), dalam konten analisis terkandung tema tentang pengungkapan pertanggungjawaban sosial, yang terdiri dari: Ekonomi, Lingkungan Hidup, Ketenagakerjaan, Hak Asasi Manusia, Kemasyarakatan, Tanggung jawab atas Produk

2.10 Pengembangan Hipotesis



2.10.1 Pengaruh Kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan

Kepemilikan manajerial merupakan jumlah kepemilikan saham yang secara aktif dalam manajemen untuk pengambilan keputusan. Keputusan manajemen dalam kesejahteraan *stakeholder* sangatlah perlu, salah satunya adalah keputusan dalam melakukan peningkatan nilai perusahaan. Kepemilikan manajerial yang akan meningkat, bisa meningkatkan nilai perusahaan (Apriada,2010). Kepemilikan pemegang saham sangatlah ditentukan seberapa besar kepemilikan saham disuatu perusahaan. Ningsih (2013), Rizki dan Wien (2010), Wiem dan Rusiti (2014) mengungkapkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif pada nilai perusahaan sehingga semakin tinggi proporsi kepemilikan manajerial, maka nilai perusahaan juga akan terus meningkat. Tidak sejalan dengan penelitian Putu dan Wayan (2014), Ramadhan dan Raharja (2014) yang mengungkapkan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan..

2.10.2 Pengaruh Kepemilikan Instirusional terhadap nilai perusahaan

Kepemilikan Institusional merupakan presentase hak suara yang dimiliki oleh institusi. Konflik dapat diminimalisasi dengan adanya peran yang sangat penting dari kepemilikan institusional (Jensen dan Meckling,1976). Kepemilikan Institusional dapat menjadi monitor dan meningkatkan kesejahteraan pemegang saham. Sehingga, Kinerja manajer akan meningkat ketika institusi melakukan pengawasan (Anastasia dan Rustiana, 2012). Semakin besar peningkatan kepemilikan institusional maka semakin efisien pemanfaatan aktiva yang digunakan. Penelitian terdahulu mengungkapkan Wiem dan Rusiti (2014), Putu dan Wayan (2014) bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Kepemilikan institusional dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan memanfaatkan informasi, serta kepemilikan Institusional dapat mengatasi konflik keagenan sehingga aktivitas perusahaan akan diawasi oleh pihak institusi atau lembaga. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengawasan institusi dapat meningkatkan kinerja perusahaan sehingga nilai

perusahaan akan meningkat pula. Tidak sejalan dengan penelitian Ramadhan dan Raharja (2014) yang mengungkapkan bahwa kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan.). kepemilikan institusional mengidentifikasi yang besar atau lebih besar dari 5%.

2.10.3 Pengaruh Komite Audit terhadap nilai perusahaan

Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) mendefinisikan komite audit sebagai berikut yaitu suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibantu oleh dewan komisaris dan dengan demikian tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris (atau dewan pengawas) dalam menjalankan fungsi pengawasan (oversight) atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit dan implementasi dari corporate governance di perusahaan-perusahaan. Komite audit merupakan pihak independen dalam hal ini independen keanggotaan dan fungsi audit. Karena dibutuhkan transparansi audit dalam pertanggungjawaban manajemen perusahaan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan para pelaku pasar modal. Ketika kepercayaan pasar modal semakin meningkat maka nilai perusahaan semakin meningkat pula. Fitrah (2017) dan Islam (2015) mengungkapkan bahwa komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan

2.10.4 Pengaruh Proporsi Komisaris terhadap nilai perusahaan

Dewan komisaris Independen adalah anggota komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajer, anggota dewan komisaris lainnya, dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis dan hubungan lainnya yang dapat memperbarui kemampuannya untuk bertindak independen atau semata-mata demi kepentingan perusahaan (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006). Komisaris Independen merupakan pemegang saham utama, anggota Direksi dan/atau anggota dewan komisaris lainnya. Menurut Carningsih (2009) mengungkapkan bahwa semakin tinggi proporsi komisaris independen dalam perusahaan, maka diharapkan

pemberdayaan dewan komisaris ini dapat melakukan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi secara efektif dan lebih memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Hary (2014) bahwa komisaris Independen memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Sehingga menunjukkan bahwa kerja dewan komisaris baik sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan

2.10.4 Pengaruh Audit Eksternal terhadap nilai perusahaan

Variabel audit eksternal memiliki perananan penting dalam mengendalikan laporan keuangan sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan, sehingga dapat menarik investor dalam meningkatkan nilai perusahaan (Ramadhan & Raharja,2014). Kegiatan Audit Eksternal dimaksudkan sebagai persyaratan pada perusahaan yang go public untuk memberikan bukti akan kebenaran laporan keuangan kepada investor. Selain itu juga bisa dimaksudkan untuk melakukan tugas khusus seperti penyelidikan (Wikipedia). Audit eksternal akan membuat hasil audit atas perusahaan, sesuai dengan nilai-nilai yang telah ditetapkan oleh perusahaan, sehingga tidak membuat seorang investor ragu akan kondisi perusahaan. Asmi (2014) mengungkapkan bahwa audit eksternal akan mempengaruhi nilai perusahaan. Audit eksternal telah menjalankan tanggung jawabnya sehingga respon baik dari *stakeholder* dan meningkatkan nilai perusahaan

2.10.2 Coustamer Sosial Responsibility terhadap nilai perusahaan

Perusahaan dalam menjaga hubungan dengan pihak *stakeholder*, dilakukan dengan beberapa tindakan salah satunya melalui *corporate sosial responbility* (CSR). *Corporate Sosial Responsibility* (selanjutnya disebut CSR) merupakan bentuk tanggung terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan(Wikipedia). Dalam melakukan CSR bukan hanya sebagai tindakan sukarelawan, tetapi lebih dari itu sebagai tuntutan agar perusahaan bisa bertahan. Program CSR bukan hanya fokus pada sosial tetapi pada lingkungan pula. Semakin banyak perusahaan melakukan

tanggung jawab terhadap lingkungan, secara tidak langsung makan *image* perusahaan akan semakin meningkat. Reny dan Dennys (2012) mengungkapkan bahwa CSR berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini berbeda pendapat dengan penelitian Budy (2016) mengungkapkan bahwa CSR tidak berpengaruh terhadap nilai perusaha